

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah faham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman sholat sudah merata di kalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah SWT, sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahzhah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi

salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan ummat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam memiliki potensi yang besar dari segi penerimaan pajak melalui zakat. Seperti diketahui penerimaan negara didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak, setelah sekian lama diperankan oleh minyak dan gas. Peranan minyak dan gas tidak dapat terus diharapkan sebagai sumber utama penerimaan negara karena keberadaannya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, membuat pemerintah harus mencari alternatif lain yang menggali sumber penerimaan, salah satunya melalui pajak.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, peraturan-peraturan perpajakan tentu banyak pula yang tidak sesuai dengan tuntutan perekonomian, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan informasi Undang-Undang Perpajakan yang diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang perpajakan. Selama ini sebagian dari masyarakat, baik aparat pajak akan berusaha untuk mengenakan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak yang sekecil-kecilnya. Seolah-olah terdapat jurang pertentangan yang besar antara aparat pajak dengan wajib pajak (Sangudi, 2000:27).

Selain besaran pajak, umat Islam Indonesia masih harus membayar zakat yang pada hakekatnya mirip dengan pajak. Ada anggapan bahwa umat Islam di Indonesia seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak penghasilan juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu untuk keadilan sudah selayaknya para pembayar zakat yang dibayarkan ditetapkan sebagai faktor pengurang atau biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP).

Zakat merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset dan kekayaan ummat. Melalui zakat diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin, sehingga mereka juga ikut merasakan nikmatnya. Dalam Islam, zakat merupakan rukun agama, sedangkan dalam perekonomian, zakat merupakan sarana terpenting dalam distribusi kesejahteraan. Sedangkan Pajak punya konsep tersendiri, ia diatur oleh negara, bukan agama. Aturan-aturan yang ada dipajak bersifat berubah-ubah disesuaikan sepanjang kebutuhan.

Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini dapat dipandang sebagai setapak lebih maju didalam mengartikulasikan keinginan umat Islam Indonesia. Undang-Undang ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap umat Islam dalam membayar pajak. Dalam UU tersebut memuat konsep-konsep manajerial yang profesional terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia. Dengan hitungan kuantitatif umat Islam yang sangat besar, potensi zakat

sebagai penggerak ekonomi nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain itu dapat dikatakan bahwa ini merupakan kali pertama dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara. Pengelolaan zakat secara sistematis dan teratur berdasarkan ketentuan sebenarnya bisa menjadi salah satu komponen pengurang pajak penghasilan (PPh).

Untuk menyempurnakan UU No. 38/1999, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dimana mulai tahun 2001 para pembayar zakat penghasilan (zakat maal) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atau biaya atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang sama dengan pajak.

Terbitnya UU No. 17 Tahun 2000 memang melegakan umat Islam karena zakat diakui sebagai faktor pengurang pajak penghasilan. Namun masalah lain muncul, yaitu belum adanya bukti standar pembayaran zakat pada beberapa lembaga Islam. Dapat saja oknum wajib pajak membayar minimal di lembaga zakat dan membuat laporan fiktif yang menyebutkan pembayaran zakat yang lebih besar, sehingga pajak yang dibayarkan kepada

negara menjadi berkurang. Oleh karena itu perlu adanya standarisasi misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat berdampingan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Namun pada dasarnya hal ini tidak akan terjadi jika masyarakat memahami dengan betul fungsi pajak dan fungsi zakat. Jika hal ini dipahami dengan benar, maka pembayaran zakat dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan.

Hal ini didukung dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* maka wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan penggunaan pembukuan ataupun pencatatan oleh wajib pajak, sedangkan penerapan sistem *self assessment* dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Fatima (2002) yang meneliti tentang zakat dalam perhitungan pajak menemukan bukti bahwa wajib pajak dapat melaporkan bukti setoran zakat untuk dikurangkan dengan penghasilan kena pajak. Dalam SPT tahunan PPh tersebut terdapat kolom yang secara khusus memuat/menampung zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Penelitian Ida Harnanik (2005) menyimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa rencana pembayaran zakat dari para wajib pajak dapat diperhitungkan dalam bagian perhitungan pajak penghasilan. Responden juga berpendapat bahwa perlu disosialisasikan adanya bukti setoran zakat yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian Hariadi (2003) menyimpulkan bahwa bukti setoran zakat harus seragam dan memunyai pengamanan khusus, sehingga tidak mudah dipalsukan. Formulir dan bukti pembayaran zakat dapat mudah diperoleh oleh wajib pajak dan tersedia di seluruh BAZ dan LAZ, kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan pajak dan tempat pembayaran zakat (bank) yang sah dan ditunjuk.

Penelitian Alfitri (2005) menunjukkan bahwa tidak ada manajemen profesional pada pihak kolektor non pemerintahan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari pajak. Kepastian hukum sebagai bagian dari manajemen zakat di Indonesia menunjukkan telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak 1999. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh badan non pemerintah atau badan kolektor zakat menjadi rintangan di dalam upaya pemerintah melakukan pemungutan pajak karena tidak adanya manajemen yang baik.

Penelitian Dolly Soflantila (2005) meneliti tentang persepsi wajib pajak pribadi di Semarang terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara wajib pajak pribadi bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahman (2003) mengemukakan bahwa distribusi pajak memerlukan institusi/lembaga ekonomi yang jelas dan amanah. Terdapat konsep serupa dan sebangun antara pajak dan zakat, yaitu ada yang wajib berzakat dan ada yang wajib membayar

pajak. Zakat dapat dikembangkan konsep Baitul Mal khususnya dalam masalah pengelolaan Fiskal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Surakarta)’**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dirumuskan adalah bagaimanakah persepsi wajib pajak orang pribadi di Surakarta terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi di Surakarta terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian.

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak di Surakarta dalam melaksanakan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang menjadisemacam acuan utama dalam penelitian serta diuraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi landasan terbentuknya hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, instrumen pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, model dan metode analisis data.

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran